

## **MATA KULIAH JAPANESE TEACHING DALAM KURIKULUM NON-KEGURUAN**

Diah Soelistyowati ([ddiecan@yahoo.com](mailto:ddiecan@yahoo.com))  
Universitas Dian Nuswantoro Semarang

**Abstract:** *In recent years, Japanese studies in Indonesia has increased greatly, so, it becomes an opportunity for students to develop their competence in the workplace. Therefore, Japanese Teaching is required as to support the curriculum of the Department of Japanese Literature. This is in accordance to the vision and mission of Dian Nuswantoro University.*

**Keywords :** *Japanese Teaching, Dian Nuswantoro University, curriculum*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dinyatakan bahwa penuntasan wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. Program ini ditargetkan selesai pada tahun 2008/2009. Indikator utama penuntasan Wajar Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Dan sisi jumlah siswa, Pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan layanan pendidikan terhadap sekitar 1.9 juta anak usia 13-15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/ yang sederajat. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program nasional tersebut.

Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah:

1. Mendorong anak-anak usia 13-15 agar masuk sekolah baik di SMP, MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
2. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.
3. Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

6. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.

Adapun usaha Pemerintah untuk menunjang terwujudnya wajib belajar 9 tahun di antaranya dengan memberikan sejumlah beasiswa pada siswa. Anak usia 13-15 tahun yang sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan untuk mengikuti pendidikan sebagai berikut:

1. Semua anak SMP/MTs atau yang sederajat dapat memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prioritas kepada siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 324.500,-/siswa/tahun. BOS diserahkan pengelolaannya kepada sekolah.
2. Beasiswa retrieval, sebesar Rp. 1.000.000,- /siswa/tahun untuk tahun pertama dan Rp. 500.000,-/siswa/tahun bagi anak putus sekolah SMP/MTs
3. Beasiswa transisi bagi siswa kelas VI SD/MI atau yang sederajat yang karena alasan ekonomi terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Besar beasiswa transisi adalah Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun.
4. Beasiswa untuk siswa SMP Terbuka, sebesar Rp. 240.000,-/siswa/tahun

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa salah satu masalah yang dihadapi untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun adalah masalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus dibebankan pada orang tua. Dari program bantuan yang dijalankan oleh Pemerintah tentunya masih ada siswa yang belum mendapatkan program bantuan tersebut. Baik karena jumlah beasiswa yang kurang mencakup keseluruhan siswa maupun karena salah sasaran atas penerima program bantuan pemerintah. Namun setidaknya Pemerintah telah melakukan usaha untuk mendukung secara nyata untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

Para orang tua siswa akhir-akhir ini tidak hanya menyerahkan pendidikan keilmuannya melalui sekolah saja namun juga mulai banyak meminta lembaga penyelenggara pendidikan lain di luar sekolah di antaranya lembaga kursus untuk menambah keilmuan dengan berbagai alasan. Berdasarkan data yang terdapat pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) lembaga kursus legal yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 sejumlah 14.005 buah. Tentunya jumlah ini belum mencakup penyelenggara pendidikan yang belum terdaftar serta bimbingan belajar dan les privat.

Para pengajar di lembaga-lembaga kursus dan les- les privat sebagian besar masih berstatus sebagai mahasiswa yang justru tidak sedang mengikuti perkuliahan yang menggunakan kurikulum keguruan. Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena pengajar lembaga kursusan tersebut tersebar dan dalam jumlah

yang cukup banyak. Adanya lembaga kursus yang semakin bertambah memerlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan berbahasa Jepang, selain itu juga kemampuan mengajar dari keilmuan pendidikan kurikulum keguruan. Berdasarkan latar belakang tersebut yang mendasari pemikiran untuk memasukkan kurikulum keguruan selain pengajaran bahasa Jepang.

### **PERSAINGAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

Menurut data yang disajikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terdapat 83 buah. Jumlah PTN di Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia pada tahun 2006/2007 diketahui sejumlah 2.556 buah kemudian pada tahun 2007/2008 meningkat hingga mencapai 2.596 buah bahkan pada tahun 2010 jumlahnya semakin bertambah hingga mencapai 3.017 buah. Dengan demikian jumlah seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia sejumlah 3.100 buah.

Di Indonesia hanya terdapat 7 buah perguruan tinggi yang bergerak dalam ilmu kependidikan yang dulu kita kenal dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). IKIP bertujuan untuk mendidik mahasiswa untuk menjadi guru. Pada perguruan tinggi non kependidikan menggunakan kurikulum yang sama sekali tidak menggunakan kurikulum atau mata kuliah yang bermuatan kependidikan. Karena arah dari Perguruan Tinggi ini untuk mencetak mahasiswa sebagai seorang peneliti.

Persaingan dalam dunia pendidikan semakin kuat ketika muncul Kepres RI Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas. Beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) mulai mengubah bentuk institusinya menjadi universitas secara bertahap. Bentuk perubahan ini mengadopsi bentuk dari PT non-keguruan. Hal ini menyebabkan kurikulum yang terdapat di dalamnya pun mengalami perubahan. Ada yang menggunakan 2 (dua) jenis kurikulum yang digunakan bersamaan secara berdampingan yaitu berupa kurikulum keguruan dan non-keguruan bahkan ada yang berubah total hanya menggunakan 1 (satu) kurikulum yaitu kurikulum non-keguruan saja. Hal ini menyebabkan persaingan perolehan mahasiswa antara PTN dan PTS semakin kuat. Karena ada beberapa antara perguruan tinggi negeri yang memiliki jurusan atau program studi yang sama serta ada perguruan tinggi memiliki jurusan atau program studi yang sama dengan perguruan tinggi swasta.

Besarnya angka yang menunjukkan jumlah PTS di Indonesia sungguh luar biasa. Meningkatnya jumlah PTS yang ada bukan berarti tidak memiliki kendala. Salah satu kendala yang cukup besar yang dialami oleh PTS adalah keberlangsungan hidup PTS tersebut sangat bergantung dari dana yang diperoleh dari mahasiswa. Karena PTS tidak mendapatkan subsidi pembiayaan operasional

dari pemerintah seperti halnya PTN maka seluruh biaya pemeliharaan, operasional, dan pengembangan PTS dibebankan kepada mahasiswa. Biaya yang harus ditanggung seluruhnya oleh mahasiswa atau orang tua wali dapat menimbulkan kesan kuliah di sebuah PTS mahal biayanya. Hal ini dapat menyebabkan salah seorang atau bahkan beberapa mahasiswa putus kuliah di tengah jalan. Sebagai catatan penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 sejumlah 31 juta penduduk. Oleh karena itu ada beberapa mahasiswa yang sedang menempuh kuliah, sambil bekerja untuk membantu orang tua membiayai kuliah atau biaya hidup selama kuliah.

### **PENDIDIKAN BAHASA JEPANG DI DIY DAN JAWA TENGAH**

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mencatat pada tahun 2008/2009 mahasiswa yang terdaftar pada bidang bahasa dan sastra pada perguruan tinggi non-keguruan berjumlah 43.847 orang termasuk 4.513 orang menekuni bidang bahasa Jepang dan 333 orang di antaranya ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Pada saat ini ada 4 (empat) Universitas yang membuka jurusan bahasa Jepang di DIY dan Jawa Tengah baik negeri maupun swasta, Universitas dengan konsentrasi jurusan Pendidikan Bahasa Jepang adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Negeri yang membuka jurusan Bahasa Jepang adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program studi sastra Jepang di Semarang adalah Universitas Dian Nuswantoro.

### **UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG (UDINUS)**

#### **Profil Program Studi Sastra Jepang UDINUS**

Program Studi Sastra Jepang UDINUS mulai sejak tanggal 10 Juni 2004 dengan SK DIKTI No.2022/D/T/2004. Saat ini, Program Studi Sastra Jepang UDINUS telah terakreditasi BAN PT dengan status B, No.SK Akreditasi 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 dan berlaku hingga 10 Juli 2012.

Program Studi Sastra Jepang UDINUS saat ini memiliki 8 orang staf pengajar, terdiri atas dosen yang berkualifikasi 1 (satu) orang doktor (S3) di bidang sejarah pemikiran Jepang, 2 (dua) orang master (S2) bidang kajian wilayah Jepang dan linguistik, 4 (empat) orang sedang menempuh program S2 sastra dan linguistik dan 1 (satu) orang di bidang pendidikan bahasa Jepang.

Program Studi Sastra Jepang UDINUS memiliki visi “Menjadi Program Studi Sastra Jepang terbaik di Bidang Akademis dan Kewirausahaan”. Berdasarkan visi tersebut Program Studi Sastra Jepang UDINUS berusaha membuat kurikulum yang bertujuan untuk mewujudkan keunggulan sisi akademis dan kewirausahaan yang mendasari dalam penyusunan mata kuliah.

## **MATAKULIAH PENGAJARAN BAHASA JEPANG (*JAPANESE TEACHING*)**

Sesuai dengan visi jurusan program studi bahasa Jepang UDINUS dengan mengarahkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa, maka matakuliah *Japanese Teaching* bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa agar dapat menerapkan ilmunya ke dalam dunia kewirausahaan terutama yang berkaitan dengan bahasa Jepang maupun pengajaran bahasa Jepang baik berupa pendirian lembaga kursus, organisator les privat, pendirian LPK dan sebagainya.

GBPP dan SAP disusun dengan mempertimbangkan atas kebutuhan pengajaran di kursus bahasa Jepang maupun di tempat lain yang membutuhkan pengajar bahasa Jepang. Latar belakang pendidikan pengajar SMA bahasa Jepang di Jawa Tengah sebagian besar bukan berlatar belakang pendidikan keguruan maupun sastra Jepang. Dengan melihat visi program studi dan potensi di wilayah Jawa Tengah, Universitas Dian Nuswantoro menyusun GBPP dan SAP banyak mengarahkan pada wilayah praktis bukan teoritis.

Satu-satunya perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah dan DIY yang mencantumkan mata kuliah *Japanese Teaching* dalam kurikulum non-keguruan adalah Sastra Jepang Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Mata kuliah ini diposisikan sebagai mata kuliah pilihan, terdiri atas *Japanese Teaching 1* yang ditawarkan pada semester 7 dan *Japanese Teaching 2* ditawarkan pada semester 8. Mata kuliah ini diberikan pada tingkat terakhir yaitu pada mahasiswa tingkat 4 yang telah menempuh seluruh mata kuliah bahasa Jepang dasar (*Shokyuu*) yang diajarkan pada semester 1 hingga semester 4.

Materi matakuliah *Japanese Teaching 1* berisi tentang definisi dan tugas pengajar, menjelaskan tentang Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Rancangan Program Pengajaran (RPP), mengajarkan aplikasi pembuatan GBPP dan RPP maupun cara pembuatan silabus (*kyouan*), serta praktik mengajar di perkuliahan berupa simulasi pengajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang.

Materi matakuliah *Japanese Teaching 2* berisi tentang cara-cara dan arahan berupa bahan-bahan praktik pengajaran bahasa Jepang, praktik mengajar di depan kelas, dan evaluasi praktik pengajaran bahasa Jepang di SMA. Mata kuliah *Japanese Teaching 2* terdiri atas 2 sks. Pada perkuliahan di semester ini sebanyak 10 kali pertemuan mahasiswa diwajibkan praktik mengajar bahasa Jepang di SMA-SMA yang telah ditentukan. Pembagian jam praktik mengajar sebanyak 10X pertemuan tersebut disesuaikan dengan SMA yang dituju selama 3 sampai 4 minggu. Setelah itu 4 kali pertemuan perkuliahan selanjutnya adalah membahas tentang hasil evaluasi praktik mengajar di SMA tempat dimana mahasiswa tersebut melakukan praktik mengajar.

Penentuan lokasi pemilihan SMA tempat praktik mengajar kepada masing-masing mahasiswa berdasarkan pada SMA yang terdapat guru-guru yang sudah

pernah mengikuti pelatihan pengajaran bahasa Jepang (*shoukenshuu*) dari Japan Foundation. Guru-guru SMA tersebut diharapkan dapat mengarahkan dan mengevaluasi mahasiswa peserta praktik dengan menggunakan standar yang sama. Adapun lokasi praktik pengajaran bahasa Jepang yang tersebar di 7 (tujuh) SMA di Semarang, antara lain: SMAN 5, MAN 1, SMAN 9, SMAN 11, SMAN 14, SMAN 15, dan SMAN 16.

### **MAHASISWA DAN LULUSAN YANG TELAH MENGIKUTI MATA KULIAH *JAPANESE TEACHING 1* DAN *2***

Meskipun hanya merupakan matakuliah pilihan, mahasiswa yang berminat mengikuti matakuliah *Japanese Teaching* dari tahun ke tahun jumlahnya sangat signifikan, hal itu dapat dilihat dari tabel berikut ini jumlah mahasiswa yang menempuh matakuliah *Japanese Teaching* setiap tahunnya.

Angkatan Tahun	<i>Japanese Teaching 1</i> Jumlah Mahasiswa	<i>Japanese Teaching 2</i> Jumlah Mahasiswa
2007	27 orang	25 orang
2008	7 orang	13 orang
2009	11 orang	10 orang
2010	14 orang	10 orang

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat pertamakali ditawarkan matakuliah pilihan *Japanese Teaching* pada tahun 2007 jumlahnya sangat banyak yaitu 27 orang, kemudian pada tahun-tahun berikutnya jumlahnya makin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keinginan mahasiswa menambah ilmu untuk bekal dalam mencari lapangan pekerjaan sebagai tenaga pengajar bahasa Jepang sangatlah tinggi. Oleh karena itu matakuliah *Japanese Teaching* merupakan matakuliah pilihan bagi mahasiswa yang berminat untuk mengajar bahasa Jepang sebagai alternatif penghasilan.

Selain itu, pada tahun 2010 lulusan Program Studi Sastra Jepang tercatat 9 orang telah menjadi guru di SMA di Jawa Tengah, 2 orang lulusan telah bekerjasama dengan lembaga lain yang mendirikan sebuah lembaga pelatihan bahasa dan pengiriman tenaga kerja ke Jepang (*kenshuusei*) dan 12 orang lulusan juga telah mengajar di SMA dan di lembaga kursus dan lembaga pelatihan bahasa.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mata kuliah *Japanese Teaching* merupakan mata kuliah yang termasuk dalam kurikulum institusi yang membekali mahasiswa agar dapat mengimplementasikan teori, simulasi dan praktik mengajar ke dalam dunia kerja. Meskipun di Universitas Dian Nuswantoro menggunakan kurikulum non-keguruan, akan tetapi matakuliah *Japanese Teaching* dianggap sangat penting diberikan agar mahasiswa mempunyai kompetensi dan daya saing yang lebih dibanding dengan lulusan Universitas non-keguruan yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

[http://www.kemdiknas.go.id/list\\_link/statistik-pendidikan/statistik-pt/20082009.aspx](http://www.kemdiknas.go.id/list_link/statistik-pendidikan/statistik-pt/20082009.aspx).

Diakses tanggal 14 Maret 2011.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang  
Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Menjadi Universitas

[www.scribd.com/.../PP-47-thn-2008-ttg-WAJIB-BELAJAR](http://www.scribd.com/.../PP-47-thn-2008-ttg-WAJIB-BELAJAR) Diakses

tanggal 14 Maret 2011.

Pedoman Akademik 2010-2011 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Dian  
Nuswantoro

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib  
Belajar [www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2008](http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2008). Diakses tanggal 14 Maret  
2011.

SK Akreditasi Nomor 015/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2007

SK DIKTI No.2022/D/T/2004 tentang Pendirian Program Studi Sastra Jepang  
Universitas Dian Nuswantoro Semarang